

ABSTRAK

EKO BUDIANTO TOMAYOUW. 820221033 ANALISIS INKONSISTENSI PERATURAN HUKUM PERKAWINAN ANAK, Dibimbing Oleh Suwarti dan Nam Rumkel

Perkawinan usia anak menimbulkan permasalahan hukum, adanya tumpang tindih pengaturan mengenai perkawinan yang dilakukan Cita-cita pemenuhan hak-hak anak dan sekaligus dalam rangka perlindungan anak Negara membentuk UU perlindungan dalam proses penyempurnaannya sampai saat ini kita dapat melihat upaya-upaya negara lewat dua kali penyempurnaan (revisi).. Analisis inkonsistensi peraturan hukum perkawinan anak merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu; Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya inkonsistensi pengaturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana dispensasi nikah perkawinan anak ditinjau dari perspektif kemaslahatan.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi, dengan sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan perundang-undangan dan berbagai putusan-putusan pengadilan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi peraturan perkawinan anak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya perlindungan perkawinan yang dilakukan anak karena alasan tertentu melalui dispensasi nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan anak harus diberikan perlindungan dengan tujuan kemaslahatan karena anak yang melakukan perkawinan tujuannya bukan semata-mata untuk menentang aturan hukum, oleh karena itu dispensasi nikah menunjukkan perlindungan melalui jalur kemaslahatan.

Kata Kunci: Inkonsistensi, perkawinan anak

ABSTRACT

FAISAL I SANGAJI. 820221035. *Community Legal Protection Related to Electricity Pole Removal in Perspective of Electricity Law, supervised by Rusdin Alaudin and Nam Rumkel*

This research aims to analyze the laws and regulations related to the removal of electricity poles and the provision of compensation for the rights of communities affected by the erection of electricity poles, as well as to see how these regulations provide legal protection for affected communities.

This research method uses empirical legal research (empirical legal research) this method is a study that presents how or procedures or steps that must be taken in a study systematically and logically.

The results of this study aim to bring justice to the community regarding the establishment and removal of electricity poles carried out by PT PLN (Persero) Ternate City. The provision of electricity poles is for the welfare of the people and the prosperity of the people, not the other way around, which has a detrimental impact on the community. This research was conducted at PT PLN (Persero) UP3 Ternate, so it is necessary to approach using preventive legal protection by involving or involving affected communities in determining the point and ensuring that the construction is in accordance with safety and safety distances. It is also obligatory to conduct supervision from the government on the establishment of electricity networks which is part of preventive legal protection of community rights in Fitu Village, South Ternate City, in accordance with the provisions contained in the Electricity Law Article 30 paragraphs 1 and 2 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity.

Electricity Act has provided sufficient legal basis for the community, so that the community affected by the establishment of electricity poles, is entitled to compensation for land occupation by PT PLN (Persero) in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Electricity; Compensation;; Legal Protection

